

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BULAN MEI 2019

Disusun Oleh:
Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH)





Daftar Isi

Daftar Isi	į
Latar Belakang	1
Tujuan	1
Kinerja BPKH	1
Kinerja Bidang Secara Umum	8
Kegiatan Media Expose dan Rapat dengan Stakeholder	9
SDM BPKH <i>Wide</i>	10
Manajemen Risiko BPKH <i>Wide</i>	11
Laporan Hasil Audit Internal BPKH	12
Laporan Hukum dan Kepatuhan	12
Laporan Keuangan BPKH	13
Penutup	14

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BULAN MEI 2019

I. Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan Mei 2019 merupakan amanah dari Pasal 52 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, Badan Pelaksana BPKH diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji yang berisi Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

II. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan Mei 2019, meliputi antara lain:

- a. memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- b. melakukan analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana:
- c. sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dalam pengelolaan keuangan haji.

III. Kinerja BPKH

Sampai dengan bulan Mei 2019, secara umum masing-masing bidang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun sebelumnya.



Grafik 1. Nilai Manfaat per Instrumen s.d. Mei 2019

Dana kelolaan BPKH s.d. bulan Mei 2019 adalah sebesar Rp111,63 triliun, kondisi ini naik sebesar Rp170 miliar dibandingkan bulan April 2019 yang tercatat sebesar Rp111,46 triliun. Peningkatan ini salah satunya berasal dari setoran awal calon Jemaah haji yang mendaftar di bulan Mei 2019. Dana Kelolaan Haji pada bulan Mei 2019 berbeda kondisi dengan bulan-bulan sebelumnya,

dimana dana kelolaan terkonsentrasi pada penempatan sebesar 48% atau setara Rp53,6 triliun dan Investasi sebesar 52% atau setara dengan Rp58,0 triliun. Hal tesebut telah sesuai dengan PP No 5 tahun 2018 pasal 27 ayat 2 yang mengatur tentang jumlah porsi dana penempatan di perbankan syariah tidak boleh lebih dari 50%. Faktor lain yang menyebabkan turunnya dana penempatan ini adalah adanya *shifting* dana dari penempatan ke investasi, yaitu berupa pembelian SBSN sebesar Rp9 Triliun.

Pada Tabel 3.1 di bawah, digambarkan target bisnis BPKH tahun 2019 dengan pencapaian sampai dengan bulan Mei 2019.

Tabel 3.1. Pencapaian Target Bisnis BPKH s.d. bulan Mei 2019

No.	Deskripsi	Target 2019	Target s.d. Mei 2019	Realisasi s.d. Mei 2019	%	Deviasi pencapaian (%)
1.	Total Dana Kelolaan	121,3 triliun	116,07 triliun	111,63 triliun	96,17	(3,83)
2.	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah Haji Baru					
	a. Reguler	650 ribu orang	270 ribu orang	224 ribu orang	82,96	(17,04)
	b. Khusus	-	-	5,9 ribu orang	-	-
3.	Tambahan Dana Kelolaan Baru	16,25 triliun	6,77 triliun	5,68 triliun	83,90	(16,10)
	a. Reguler	16,25 triliun	6,77 triliun	5,60 triliun	82,72	(17,28)
	b. Khusus	-	-	86,19 miliar	-	-
4.	Pendapatan	7,22 triliun	3,00 triliun	2,64 triliun	88,00	(12,00)
	a. Penempatan Dana	2,96 triliun	1,23 triliun	1,38 triliun	112,19	12,19
	i. Giro dan Tabungan	14,29 miliar	5,94 miliar	12,85 miliar	216,33	116,33
	ii. Deposito	2,86 triliun	1,19 triliun	1,35 triliun	109,76	9,76
	iii. Dana DAU	88,66 miliar	36,94 miliar	22,76 miliar	61,61	(38,39)
	b. Investasi	4,26 triliun	1,77 triliun	1,26 triliun	71,19	(28,82)
	i. Surat Berharga	3,68 triliun	1,53 triliun	1,20 triliun	78,43	(21,57)
	ii. Emas	1	-	-	-	-
	iii. Investasi Langsung	92,9 miliar	38,70 miliar	-	-	-
	iv. Investasi Lainnya	377,2 miliar	157,16 miliar	-	-	-
	v. Dana DAU	111,66 miliar	46,52 miliar	63,13 miliar	135,71	35,71
5.	Pengeluaran					
	a. BPIH (indirect cost)	7,04 triliun	-	-	-	-
	b. Virtual Account	1,2 triliun	-	-	-	-
	c. Kemaslahatan	177,13 miliar	73,80 miliar	5,7 miliar	3,22	(96,78)
	d. Operasional BPKH	282,44 miliar	117,68 miliar	44,4 miliar	15,72	(84,28)

Tabel 3.2 di bawah, merupakan informasi mengenai jumlah penambahan calon jemaah haji baru secara akumulatif s.d. bulan Mei 2019 yang berjumlah 224.023 orang untuk calon Jemaah haji regular dan 5.992 orang untuk calon Jemaah haji khusus. Pencapaian target secara proporsional adalah sebesar 35,39% dari target total 2019 sebanyak 650.000 orang. Namun apabila dibandingkan dengan pencapaian pada target s.d. bulan Mei 2019, pencapaiannya sebesar 82,96%.

Tabel 3.2. Penambahan Jumlah Calon Jemaah Haji Baru s.d. bulan Mei 2019

No	Jenis	Target	Bulan Mei 2019		
INO	CalHaj	2019	Target	Real	%
1	Reguler	680	270	224	82,96
2	Khusus	-	-	5,9	
	Total	680		229,9	35,39

Jumlah penambahan dana kelolaan dari setoran awal calon jemaah haji baru tersebut, baik jemaah haji reguler maupun khusus, secara akumulatif s.d. bulan Mei 2019 adalah sebesar Rp5,68 triliun dengan pencapaian proporsional sebesar 34,95% dari target pertambahan dana kelolaan dari setoran awal total tahun 2019 sebesar Rp16,25 triliun.

Tabel 3.3. Penambahan Dana Kelolaan Baru BPKH s.d. bulan Mei Tahun 2019

No	Jenis	Target	Bul	an Mei 2	019
NO	CalHaj	2019	Target	Real	%
1	Reguler (Rp triliun)	16,25	6,77	5,60	83,90
2	Khusus (Rp miliar)	-	-	86,19	-
	Total (triliun)	16,25		5,68	34,95

Merujuk pada target pencapaian pendapatan BPKH tahun 2019, target total pendapatan dari nilai manfaat adalah sebesar Rp7,22 triliun. Jumlah tersebut berasal dari target nilai manfaat hasil investasi pada surat-surat berharga, emas, dan investasi lainnya dengan jumlah sebesar Rp4,26 triliun serta dari target hasil penempatan pada giro, tabungan, dan deposito di BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp2,96 triliun. Total target pendapatan dimaksud sudah termasuk target pendapatan nilai manfaat yang diperoleh dari DAU (Dana Abadi Umat), baik dari pendapatan penempatan dana di BPS-BPIH (Rp88,66 miliar) maupun dari pendapatan investasi (Rp111,66 miliar).

Total realisasi pendapatan nilai manfaat yang diperoleh BPKH berasal dari penempatan dana dan investasi periode s.d. bulan Mei 2019 adalah sebesar Rp2,64 triliun, dengan persentase pencapaian nilai manfaat BPKH wide sebesar 36,56% (dari total target nilai manfaat Rp7,22 triliun selama tahun 2019). Realisasi nilai manfaat untuk penempatan pada giro, tabungan, dan deposito (termasuk DAU) di BPS-BPIH adalah sebesar Rp1,38 triliun atau 112,19% dari target bulan Mei 2019 sebesar Rp1,23 triliun, sedangkan realisasi nilai manfaat untuk investasi adalah sebesar Rp1,26 triliun (termasuk DAU) atau 71,19% dari target bulan Mei 2019 sebesar Rp1,77 triliun.

Rincian target dan realisasi nilai manfaat BPKH periode Januari s.d. Mei 2019 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4. Pendapatan BPKH dari Nilai Manfaat s.d. bulan Mei 2019

(Rp triliun)

No	Penempatan/ Target 2019		Jan s.d. Mei 2019		
NO	Investasi	Target 2019	Target	Real	%
1	Giro & Tabungan		0,005	0,012	216,33
2	Deposito	2,96	1,19	1,35	109,76
3	Deposito DAU		0,036	0,022	61,61
Total s.d. Mei 2019		1,23	1,38	112,19	

No	Penempatan/		Jan s.d. Mei 2019		
NO	Investasi Target 2	Target 2019	Target	Real	%
4	Surat Berharga		1,53	1,20	78,43
5	Investasi Langsung		0,038	ı	-
6	Emas	4,26	-		-
7	Investasi Lainnya		0,157	ı	-
8	SBSN DAU		0,046	0,063	135,71
Tota	Total s.d. Mei 2019		1,77	1,26	71,19
Tota	l s.d. Mei 2019	7,22	3,00	2,64	88,00
Tota	I	7,22		2,64	36,56

Pada grafik 2 di bawah ini, tergambar perbandingan mengenai komposisi dana kelolaan berdasarkan kategori Penempatan dan Investasi pada bulan April dan Mei 2019.



Grafik 2. Komposisi Dana Kelolaan BPKH Periode April dan Mei 2019

Pada bulan Mei 2019, komposisi dana penempatan mengalami perubahan yang semula pada bulan April sebesar 56% menjadi sebesar 48%, begitu pun juga dengan komposisi dana investasi. Dana investasi mengalami peningkatan jumlah komposisi yang semula pada bulan April 2019 sebesar 44% menjadi sebesar 52%. Perubahan komposisi dana tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas, disebabkan adanya *shifting* dana dari penempatan ke investasi, yaitu berupa pembelian SBSN sebesar Rp9 Triliun.

Mengenai penempatan dana kelolaan, BPKH menempatkan dananya kepada *Bank Counterparty* yang dikategorikan menjadi BUS/UUS *subsidiary* BUMN, BUS/UUS swasta murni, BUS/UUS swasta campuran, dan BPD/UUS Syariah. Porsi terbesar dari dana kelolaan BPKH ditempatkan pada BUS/UUS *Subsidiary* BUMN yang mencapai Rp35,36 triliun. Porsi dana kelolaan pada 5 bank terbesar adalah Bank Syariah Mandiri sebesar Rp13,23 triliun, Bank BRI Syariah sebesar Rp11,32 triliun, Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp6,39 triliun, UUS BTN Syariah Rp5,81 triliun dan Bank BNI Syariah Rp4,97 triliun. Sedangkan sisa dari dana kelolaan sebesar Rp11,88 triliun tersebar di 27 bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembangunan Daerah Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPD UUS.

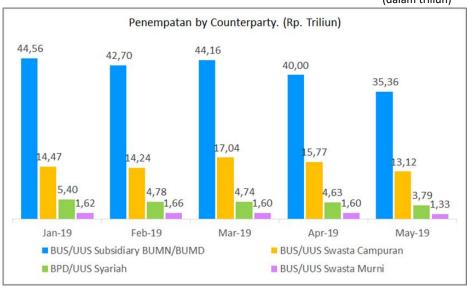
Data sebaran perolehan nilai manfaat dari BPS-BPIH terbagi kepada 32 Bank, dimana lima bank tertinggi secara akumulatif sampai dengan bulan Mei 2019 dengan rincian per bulannya seperti pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Sebaran Nilai Manfaat pada BPS-BPIH s.d. Mei 2019

(dalam triliun)

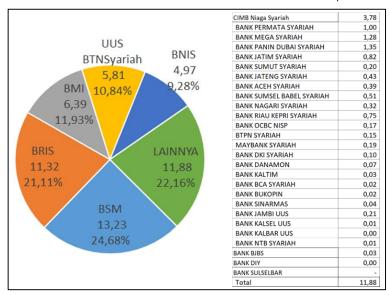
No	Bank	Triwulan I	April 2019	Mei 2019	Total
1	Bank Syariah Mandiri	218,56	77,34	66,93	362,83
2	BRI Syariah	188,84	72,22	64,23	325,29
3	BNI Syariah	82,40	25,87	21,46	129,73
4	Bank Muamalat Indonesia	91,33	30,69	27,21	149,23
5	Bank Tabungan Negara Syariah	54,27	24,62	21,20	100,09
6	Bank Lainnya	172,11	76,92	72,11	321,14
	Total	807,51	307,67	273,14	1.388,31

(dalam triliun)



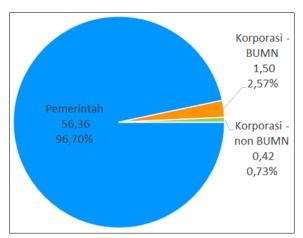
Grafik 3. Penempatan berdasarkan Kategori Bank

(dalam triliun)



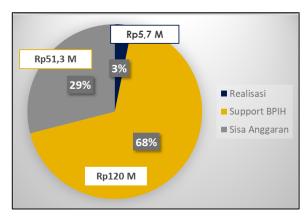
Grafik 4. Penempatan berdasarkan Bank Counterparty

Pada aktivitas investasi, BPKH menginvestasikan dana kelolaan dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah. Total dana yang diinvestasikan pada instrumen milik pemerintah sampai dengan bulan Mei 2019 mencapai Rp56,36 trilun atau 96,70% dari total investasi.



Grafik 5. Investasi berdasarkan Penerbit/Mitra Investasi

Selain menempatkan dananya pada Investasi, BPKH menempatkan dananya pada produk Bank berupa Giro, Tabungan, dan Deposito. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 pasal 27 ayat 2, bahwa penempatan dana setidaknya tidak lebih dari 50% dari jumlah total dana kelolaan. Jumlah komposisi tersebut telah terpenuhi, karena jumlah dana penempatan saat ini adalah sebesar 48%.



Grafik 6. Realisasi Kegiatan Kemaslahatan

Distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) mengalami perubahan target kelompok sasaran, dari sebelumnya 8 (delapan) kelompok atau *asnaf* pada awal terbentuknya BPKH, menjadi 6 (enam) kelompok pada saat direalisasikan tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Enam *asnaf* yang menjadi sasaran dalam program penyaluran nilai manfaat dari DAU adalah: Pendidikan, Dakwah, dan Pelayanan Haji; Sarana/Prasarana Ibadah; Kesehatan; Sosial Keagamaan; Rehab Palu dan Donggala; serta Bantuan Bencana.

Sampai dengan bulan Mei 2019, realisasi kegiatan kemaslahatan sudah terserap 3% atau sebesar Rp5,7 miliar. Selanjutnya, 68% dari seluruh anggaran kemaslahatan atau sebesar Rp120 miliar, akan digunakan sebagai penambahan fasilitas jemaah lanjut usia dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa *asnaf* yang sudah menerima distribusi nilai manfaat DAU adalah:

Pendidikan, Dakwah dan Pelayanan Haji: Sarana/Prasarana Ibadah; Kesehatan; dan Sosial Keagamaan.

Tabel 3.6. Distribusi Nilai Manfaat (NM) melalui *Virtual Account* (VA) s.d. bulan Mei Tahun 2019

	Seek deed	T 2040	Dealter tage		Triwulan I/2019	
No	Deskripsi	Target 2018	Realisasi 2018	Target	Real	%
1	Total NM	Rp6,07 triliun	Rp5,73 triliun	Rp1,80 triliun	Rp1,59 triliun	88,33
2	NM yg distribusikan	20% dari NM 2018	Rp777,39 miliar	-	Rp499,95 miliar	-
3	Total VA	-	-	-	4.132.786 Rekening	1
	a. Reguler	-	-	-	4.041.702 Rekening	1
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	19.006 Rekening	1
	Set. Awal Rp25 juta	-	-	-	4.022.696 Rekening	1
	b. Khusus	-	-	-	91.084 Rekening	1
	Set. Awal \$3000	-	-	-	146 Rekening	1
	Set. Awal \$4000	-	-	-	90.938 Rekening	-
4	NM per VA	-	-	-	Rp674.224,-	1
	a.Regular	-	-	-	Rp212.148,-	-
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	Rp94.288,-	1
	Set. Awal Rp25 juta			-	Rp117.860,-	1
	b. Khusus	-	-	-	Rp462.076,-	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	Rp198.033,-	ı
	Set. Awal \$4000	-	-	-	Rp264.043,-	-

36%

Rp277,44 M

64%

Grafik 7. Realisasi Virtual Account 2018

Nilai manfaat tahun 2018 yang didistribusikan kepada jemaah tunggu melalui rekening virtual total adalah sebesar Rp777,39 miliar, dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp499,95 miliar, didistribusikan pada tanggal 7 Februari 2019 kepada 4.041.702 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu reguler dan 91.084 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu khusus. Pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu reguler mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp94.288,- (untuk setoran awal Rp20 juta) dan Rp117.860,- (untuk setoran awal Rp25 juta); sedangkan pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu khusus mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp198.033,- (untuk setoran awal \$3000) dan Rp264.043,- (untuk setoran awal \$4000). Tahap kedua sisanya Rp277,44 miliar akan didistribusikan kepada VA

milik calon haji jemaah tunggu setelah pelaksanaan audit BPK untuk kinerja BPKH tahun 2018 selesai. Sedangkan distribusi nilai manfaat tahun 2019 ke rekening virtual calon haji jemaah tunggu akan dilakukan pada awal tahun 2020 setelah besaran nilai manfaat tahun 2019 diperoleh dan dicatat pada neraca BPKH.

IV. Kinerja Bidang Secara Umum

Kinerja masing-masing bidang diukur melalui dua aspek, yaitu: persentase pencapaian terhadap rencana output dan persentase penyerapan atas rencana anggaran. Kombinasi antara pencapaian output yang optimal dengan penyerapan anggaran yang optimal juga, diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja organisasi BPKH wide.

Berdasarkan hasil *self assessment* kinerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, sampai dengan bulan Mei 2019 terdapat bidang yang mencapai output 100% yaitu Sekdewas. Sedangkan pencapaian kinerja dari bidang-bidang lainnya bervariasi antara 21% hingga 86%. Untuk penyerapan anggaran sampai dengan bulan Mei 2019, penggunaan anggarannya pun bervariasi antara 2% hingga 22% dari anggaran kegiatan-kegiatan yang secara proporsional diimplementasikan sampai dengan periode tersebut.

Pada skala BPKH wide, pencapaian output sampai dengan bulan Mei 2019 adalah sebesar 33,78%, sedangkan tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 15,72%. Rekap kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2, sedangkan rincian kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 4.1. Pencapaian Output per Bidang s.d. bulan Mei Tahun 2019

No	Bidang	Target 2019	Real s.d. Mei 2019	%
1	A1	74	16,18	21,86
2	A2	15	7,58	50,53
3	А3	13	3	23,07
4	A4	59	17,8	30,17
5	A5	39	9,01	23,10
6	A6	6	2,3	38,33
7	A7	3	2,6	86,67
8	Audit Internal	14	5	35,71
9	Sekban*	21	13	61,90
10	Sekdewas*	9	9	100,00
	Total	253	85,47	33,78

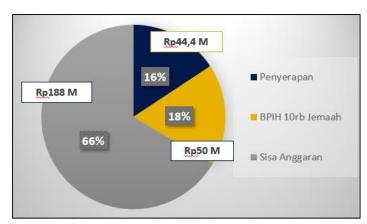
Berdasarkan tabel di atas, secara umum kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Badan dan Sekretariat Dewan Pengawas bersifat insidentil (tidak terencana) seperti kegiatan rapat, pengadaan ATK, pengadaan souvenir, kalender, dan media publikasi. Sehingga realisasi pencapaian output dalam laporan adalah pemenuhan atas target pada bulan berjalan. Oleh karena itu, pencapaian target output mendekati 100%.

Tabel 4.2. Penyerapan Anggaran per Bidang s.d. bulan Mei Tahun 2019

(Rp juta)

No	Bidang	Target 2019	Real Mei 2019	%
1	A1	7.320,31	326,80	4,46
2	A2	3.470,00	72,50	2,09
3	А3	29.867,27	2.107,29	7,06
4	A4	20.803,68	492,15	2,37
5	A5	5.667,02	1.271,93	22,44
6	A6	181.904,79	36.518,36	20,08
7	A7	10.595,77	487,98	4,61
8	Audit Internal	1.555,74	151,56	9,74
9	Sekban	9.186,59	1.166,58	12,70
10	Sekdewas	12.068,65	1.813,79	15,03
	Total	282.439,84	44.408,96	15,72

Sampai dengan bulan Mei 2019, penyerapan anggaran BPKH mencapai 15,72% atau sebesar Rp44,4 miliar. Selain anggaran operasional, pada bulan Mei ini juga telah dicatat berupa biaya penambahan kuota jemaah haji sebesar 10.000 orang yang diserap dari RKAT 2019 sebesar 18% atau setara dengan Rp50 miliar.



Grafik 8. Penyerapan Anggaran RKAT 2019

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam RKAT 2019, setiap bidang mempunyai *non budgetary activities*. Pada periode Januari s.d. Mei 2019, jumlah total *non budgetary activites* BPKH adalah sebanyak 103 kegiatan dan yang telah diselesaikan sebanyak 103 kegiatan atau 100% dari tugas yang diberikan. Rincian aktivitas yang tidak mempunyai anggaran dan telah diselesaikan hingga Mei 2019 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH pada Bulan Juni 2019 adalah total sebanyak 54 kegiatan dengan dukungan anggaran total sebesar Rp26,66 miliar. Rincian rencana kegiatan dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

V. Kegiatan Media Expose dan Rapat dengan Stakeholder

Beberapa kegiatan *media expose* dan rapat dengan para *stakeholder* rutin dilakukan sebagai cara meningkatkan *Corporate Branding* dan menjaga hubungan baik. Kegiatan-kegiatan terkait media dan interaksi dengan *stakeholder* sampai dengan bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut:

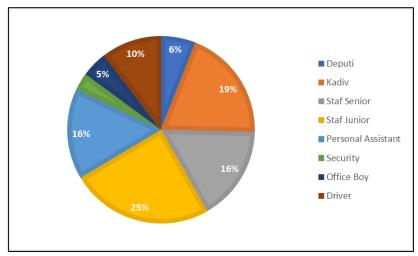
a. Media Briefing dilaksanakan 2 kali

- b. Rapat dengan DPR dilaksanakan 5 kali
- c. Rapat dengan Kementrian Agama dilaksanakan 1 kali
- d. Rapat dengan DPD dilaksanakan 1 kali
- e. Media massa (CNBC, TV One, iNews, Kompas, Republika, Portal Online, Detik) dilaksanakan 13 kali.

Laporan mengenai *Expose Media* dan Rapat dengan *Stakeholder* secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 8.

VI. SDM BPKH Wide

Sampai dengan bulan Mei 2019, jumlah pegawai BPKH saat ini adalah 136 orang. Jumlah tersebut tersebar ke dalam berbagai posisi antara lain Deputi, Kepala Divisi, Staf Pelaksana (Senior dan Junior), *Personal Assistant, Security, Office Boy,* dan *Driver*. Sebaran data pegawai BPKH dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Grafik 9. Sebaran Data Pegawai BPKH per bulan Mei 2019

Berdasarkan diagram di atas, sebaran data pegawai terlihat merata pada masing-masing jabatan. Komposisi terbesar dari jumlah pegawai BPKH adalah posisi staf Junior.

Proses rekrutmen pegawai masih dilakukan untuk mengisi posisi jabatan yang kosong. Kendala yang dihadapai dalam proses rekrutmen adalah jumlah kandidat pelamar yang masih kurang memenuhi target. Namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu pengumuman rekrutmen. Posisi jabatan yang masih belum terisi antara lain Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan, Kepala Divisi Hukum, dan Kepala Divisi Pengadaan. Proses rekrutmen pegawai dilakukan melalui seleksi terbuka di website resmi BPKH yang sampai dengan saat ini sudah memasuki tahapan asesmen.

Pada bulan Mei 2019 turnover pegawai adalah 0,75%, dengan 1 pegawai yang keluar. Pada Triwulan I turnover pegawai adalah sebesar 1,83% dengan 7 orang pegawai yang keluar. Sampai dengan bulan Mei 2019 turnover pegawai adalah sebesar 1,25% atau sebanyak 8 orang pegawai yang keluar.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai BPKH, bidang SDM telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang telah terlaksana sampai

dengan bulan Mei 2019 antara lain Induksi Pegawai BPKH, Pelatihan Media Sosial, Pelatihan Mastering Business Strategy & Portfolio dan Service Excellence. Kegiatan pelatihan akan terus dilakukan bidang SDM sebagai bagian dari program pengembangan SDM BPKH.

VII. Manajemen Risiko BPKH Wide

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPKH dapat terekspos pada beberapa risiko. Beberapa risiko utama yang wajib dikelola antara lain:

- BPKH terekspos risiko kredit dari aktivitas penempatan dan investasi. Pada Mei 2019, total dana kelolaan BPKH mencapai Rp111,63 triliun, kondisi ini naik sebesar Rp170 miliar dibandingkan dengan bulan April 2019 yang tercatat sebesar Rp111,46 triliun. Peningkatan ini salah satunya berasal dari setoran awal calon Jemaah haji yang mendaftar di bulan Mei 2019. Konsentrasi Dana Kelolaan Haji pada bulan Mei 2019 mengalami perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada Mei 2019 konsentrasi investasi lebih tinggi dibandingkan penempatan, yaitu 52% untuk investasi dan 48% untuk penempatan. Berbeda dengan bulan April 2019, dimana konsentrasi penempatan lebih besar dibandingkan investasi, yaitu 56% untuk penempatan dan 44% untuk investasi. Perubahan tingkat konsentrasi ini disebabkan pada bulan Mei 2019, BPKH membeli Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp9 Triliun.
- Risiko pasar BPKH muncul dari aktivitas penerimaan calon haji khusus, pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan reksadana. Pada Mei 2019, posisi devisa netto BPKH adalah Long. Dengan menggunakan Posisi Devisa Netto tersebut, maka apabila dilakukan stress test terhadap perubahan nilai tukar dengan skenario terjadi kenaikan/penurunan ± 1% terhadap nilai tukar baseline (31 Mei 2019: USD 14.385; SAR 3.835,90), maka potensi keuntungan/kerugian yang akan terjadi adalah -Rp 33,59 milyar s.d. Rp 33,59 miliar. Berdasarkan data yang ada, NAB Reksadana Arafah memiliki tren naik. Posisi NAB pada tanggal 21 Mei 2019 tercatat sebesar 1.022,44 atau tumbuh 0,52% dalam 1 bulan menjadi 1.027,74 (20 Juni 2019).
- Risiko kepatuhan muncul akibat masih belum terpenuhinya komposisi antara investasi dan penempatan. Pada posisi Mei 2019, komposisi investasi sudah melampaui 50%, seiring dengan adanya investasi Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp9 Triliun. Dengan demikian realisasi akhir Mei 2019 komposisi investasi (52%) dan penempatan (48%). Untuk pencapaian s.d. akhir Desember 2019 dan memenuhi PP No 5 Tahun 2018 pasal 27 ayat 2, maka diperlukan tambahan dana di penempatan sebesar Rp7,25 trilun dan investasi Rp2,57 triliun.
- Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap isu yang berkaitan dengan BPKH (selama periode 1-25 Mei 2019) ditemukan 4.087 berita dengan rincian 20% berita positif, 63% berita netral dan 17% berita negatif.
- Risiko stratejik BPKH muncul karena adanya deviasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Keseluruhan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian target belum menunjukkan pencapaian yang maksimal. Pada bulan Mei 2019, parameter pencapaian Dana Kelolaan sebesar 96,17%, pencapaian Total Jemaah Haji sebesar 82,96% dan Pencapaian Nilai Manfaat sebesar 88,00%.

Laporan Manajemen Risiko BPKH pada triwulan pertama tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5.

VIII. Laporan Hasil Audit Internal BPKH

Sampai dengan bulan Mei 2019, Bidang Audit Internal telah menerbitkan tiga Laporan Hasil Audit dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 pada Bidang Operasional dan Bidang SDM dan Kemaslahatan, Nomor LHP: 01/LHP/AI/02/2019, tanggal 6 Februari 2019.
- 2. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Setoran Awal tahun Anggaran 2018, Nomor LHP: 02/LHP/AI/02/2019, tanggal 6 Februari 2019.
- 3. Laporan Hasil Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Program Kemaslahatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 telah diterbitkan dengan Nomor: 01/LHA/AI/04/2019 tanggal 29 April 2019.

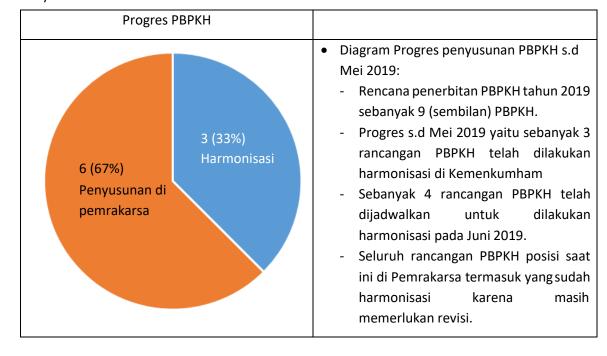
Mengacu pada RKAT Bidang Audit Internal, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal dan eksternal dilakukan per semester. Oleh karena itu, progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal dan eksternal baru dapat dilaporkan dalam Laporan Semesteran BPKH.

IX. Laporan Bidang Hukum dan Kepatuhan

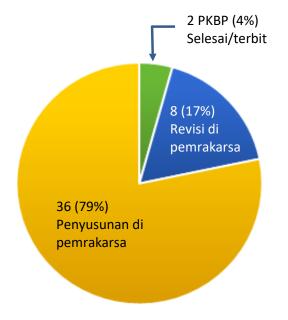
Sampai dengan bulan Mei 2019, bidang Hukum dan Kepatuhan telah menyampaikan progres mengenai rencana penyusunan PBPKH sebagai berikut:

Kepatuhan penyusunan dan pengkinian Peraturan BPKH

a. Penyusunan PBPKH tahun 2019

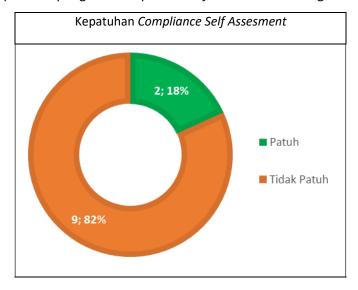


- b. Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP)
 - Progres penyusunan PBPKH s.d Mei 2019:



Keterangan:

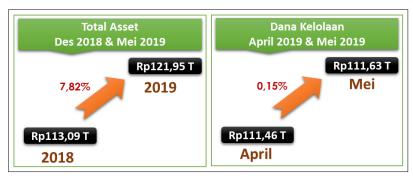
- Rencana penerbitan PKBP tahun 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) PKBP sesuai amanat dalam PBPKH.
- Progres s.d Mei 2019 yaitu sebanyak 2 PKBP telah selesai dan diterbitkan yaitu PKBP tentang Kebijakan Akuntansi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- c. Kepatuhan pengisian compliance self assessment Bidang



Laporan bidang Hukum dan Kepatuhan secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 (enam).

X. Laporan Keuangan BPKH

Kondisi kinerja keuangan BPKH pada bulan Mei 2019 menunjukan pergerakan positif, dimana terjadi peningkatan total aset sebesar 7,82% apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut tercermin dari nilai aset BPKH yang semula sebesar Rp113,09 triliun menjadi Rp121,95 triliun. Pada bulan sebelumnya, kondisi dana kelolaan sempat turun karena adanya pembayaran BPIH ke Kemenag. Namun, pada bulan Mei 2019 jumlah dana kelolaan kembali meningkat yang semula sebesar Rp111,46 triliun menjadi Rp111,63 triliun.



Grafik 10. Total Aset dan Dana Kelolaan Bulan Mei 2019

Selain hal tersebut di atas, jumlah dana penempatan telah memenuhi amanat PP no 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 27 ayat 2 dimana jumlah porsi penempatan dana pada perbankan syariah paling banyak 50% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Pencapaian BPKH dalam hal penempatan dana pada perbankan syariah di bulan Mei 2019 adalah sebesar 48%.

Laporan Keuangan BPKH bulan Mei tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

XI. Penutup

Laporan kinerja dan laporan keuangan bulan Mei ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Seluruh kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, baik yang didukung dengan anggaran maupun tidak, bertujuan untuk mendorong pencapaian target BPKH di tahun 2019.

Oleh karena itu, Badan Pelaksana akan memastikan bahwa seluruh proses kegiatan baik yang memiliki anggaran (RKAT) maupun yang tidak memiliki anggaran dilaksanakan sesuai dengan input dan output yang telah direncanakan, serta anggaran digunakan berdasar pada prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.